



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

POLEMIK PENGANGKATAN CASN 2024

Sidiq Budi Sejati
Analisis Legislatif Ahli Muda
sidiq.sejati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kegaduhan mengenai penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 muncul setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, melakukan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPR RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu, 5 Maret 2025. Menurut Menpan RB, penundaan tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan kebutuhan penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung program prioritas pembangunan, serta untuk mengakomodasi usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Dalam rapat bersama tersebut disepakati keputusan bahwa untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan Maret 2026.

Menpan RB juga mengklarifikasi kembali keputusan ini dilakukan untuk memastikan tahapan pelaksanaan seleksi CASN di beberapa daerah yang lain dapat terselesaikan dengan baik, sehingga secara keseluruhan dapat diangkat bersama dan bukan dikarenakan efisiensi anggaran. Fokus utama dari CASN 2024 adalah penyelesaian penataan pegawai non-ASN, sehingga masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki kembali dari pengadaan CASN tahun 2024. Seperti masih adanya penundaan penyelesaian dan pengadaan CPNS di beberapa instansi, ketidakcocokan usulan formasi yang disampaikan dengan data yang sudah tersedia, terdapat instansi yang tidak mengusulkan formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan serta jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam *database* BKN, serta adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Selain itu, Menpan RB juga ingin melakukan penataan terkait soal terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan ASN yang tidak sama, karena selama ini masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.

Setelah polemik terkait penundaan ramai dibicarakan oleh publik, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, ikut merespons Surat Edaran dari Kemenpan RB Nomor: B/1043/M.SM.01.00/2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN tertanggal 7 Maret 2025 terkait tindak lanjut dari hasil RDP pemerintah bersama Komisi II DPR RI. Menurut Zulfikar, keputusan pengangkatan serentak itu bertentangan dengan kesimpulan rapat, sebab yang ditekankan dalam rapat itu bahwa bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 merupakan tenggat waktu penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK oleh pemerintah.

Menpan RB mengatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN secara tuntas, sehingga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu pengadaan CASN tentu harus disertai dengan penataan yang terstruktur serta menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik lagi. Formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada pengadaan CASN tahun 2024 sebesar 248.970 formasi untuk CPNS dan 1.017.111 formasi untuk PPPK. Seleksi CPNS diselenggarakan mulai bulan Agustus 2024, sedangkan PPPK Tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada bulan Januari 2025. Menpan RB mengatakan ini adalah penetapan formasi terbesar bagi PPPK dalam sejarah sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan kembali kepada Kemenpan RB dan BKN, agar memastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pusat maupun daerah sebagaimana amanat dari Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar penataan pegawai non-ASN yang telah dilakukan sejak tahun 2005 dapat diselesaikan secara sistematis, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota.

Atensi DPR

Kendala pada pengadaan CASN tahun 2024 harus segera diperbaiki agar fokus utama terkait penataan pegawai non-ASN dapat dituntaskan secara sistematis dengan baik. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus: 1) Mendorong Kemenpan RB untuk segera memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan seleksi CASN 2024, sehingga CASN tahun seleksi 2024 dapat diangkat secara keseluruhan sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama; 2) Memastikan Kemenpan RB dan BKN tidak lagi melakukan pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pusat maupun daerah; serta 3) Meminta Kemenpan RB untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang masih melakukan pengangkatan pegawai non-ASN ke depannya, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

Sumber

antaranews.com, 5 Maret 2025;
cnnindonesia.com, 6 dan 7 Maret 2025;
kompas.com, 5, 6, 7, 8 dan 9 Maret 2025; dan
Raker dan RDP Komisi II tanggal 5 Maret 2025.

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa